

ORIENTASI POLITIK PEMILIH PEMULA MAHASISWA UNISRI DALAM PEMILUKADA JAWA TENGAH 2018

Agus Supriyadi

Ringkasan: Secara sederhana, pemilu adalah cara individu warga negara melakukan kontrak politik dengan orang atau partai politik yang diberi mandat menjalankan sebagian hak kewarganegaraan pemilih. Pemilihan Umum (Pemilu) 2018 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia sudah siap digelar. Ritual politik dalam perspektif sejarah kehidupan politik negara kita akan diselenggarakan pada tahun 2018 ini untuk memilih kepala daerah yang dilakukan secara serentak di 171 daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula mahasiswa Unisri dalam Pemilukada tahun 2018 dan untuk mengetahui orientasi dan tujuan politik pemilih pemula mahasiswa Unisri dalam keikutsertaannya dalam Pemilukada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam Pemilukada 2018 adalah faktor pengaruh media massa, faktor sosial politik, faktor citra kandidat, faktor *Current events* atau reponsibilitas calon terhadap persoalan yang ada. Orientasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada Jawa Tengah 2018 baik itu meliputi orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi dengan melakukan pencoblosan, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Kata Kunci : Pemilukada, orientasi politik, pemilih pemula.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) 2018 yang merupakan pesta lima tahunan dalam sistem demokrasi Indonesia sudah siap digelar. Ritual politik dalam perspektif sejarah kehidupan politik negara kita akan diselenggarakan pada tahun 2018 ini untuk memilih kepala daerah yang dilakukan secara serentak di 171 daerah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak yaitu pada tanggal 27 Juni 2018. Tahapan Pemilukada serentak 2018 dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan yaitu

di bulan Agustus 2017. Pemilukada serentak 2018 akan lebih besar dari Pemilukada sebelumnya. Dari 171 daerah tersebut, terdiri dari 17 propinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Pemilukada serentak 2018 kali ini, menurut data KPU diikuti oleh 160.756.143 pemilih tingkat nasional (kompas.com) dan ± 28 juta pemilih tingkat Provinsi Jawa Tengah (tribunjateng.com). Dari jumlah tersebut sebagian di antaranya adalah pemilih pemula (pascaremaja, usia 17-23 tahun), atau pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada 2018. Pemilih pemula tersebut berjumlah 10.628.883 jiwa yang terdiri dari

5.455.160 laki-laki dan 5.173.723 perempuan (Celebes.news.id).

Dalam setiap pelaksanaan pemilu jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (Golput) terbilang masih tinggi, hal ini terlihat dari jumlah partisipasi pemilih Pemilihan Gubernur 2013 hanya sebesar 55 persen, dengan demikian mereka yang Golput mencapai 45 persen (jawapos.com). Salah satu penyebab kurang antusiasnya pemilih yakni kurang dekatnya antara sosok calon dengan pemilih. Belum banyak partai politik yang melakukan pendidikan politik serius terhadap pemilih pemula ini. Mereka menggantungkan informasi politik kepada berita-berita di media massa, sesama teman, orang tua.

Untuk memperkuat tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih atas kaum remaja ini menjadi penting. Demokrasi akan digoyang terus oleh kepentingan kekuasaan, dinasti politik, klan, familisme, ideologisme, dan segala macam kepentingan kaum tua lainnya. Untuk itu, pendidikan politik yang pada saatnya mempengaruhi orientasi politik pemilih pemula yang berdasarkan kepentingan kaum remaja sendiri sangat diperlukan, terutama untuk mencegah agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai “pemilih pemula” yang tidak tahu apa-apa.

Dalam penelitian ini, akan diuraikan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pilihan politik pemilih pemula mahasiswa Unisri dalam Pemilukada tahun 2018?, dan apa orientasi dan tujuan politik pemilih

pemula dalam keikutsertaannya dalam Pemilukada tahun 2018?

Pendidikan dan Kesadaran Politik Remaja

Pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara. Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun norma-norma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga Mahasiswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.

Pendidikan politik mengupayakan penghayatan mahasiswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar mahasiswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.

Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan-hambatan demokrasi (Riza Noer Arfani, 2010: 64).

Namun demikian di samping dibicarakan masalah kesadaran berpolitik, maka perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan pengertian budaya politik, menurut Miriam Budiardjo (2007:17) konsep budaya politik ini berdasarkan keyakinan, bahwa setiap politik itu didukung oleh suatu kumpulan kaedah, perasaan dan orientasi terhadap tingkah laku politik dalam masalah Kenegaraan.

Kebudayaan Remaja sebagai Pemilih pemula

Mahasiswa atau remaja pada umumnya memiliki suatu sistem sosial yang seolah-olah menggambarkan bahwa mereka mempunyai “dunia

sendiri”. Dalam sistem remaja ini terdapat kebudayaan yang antara lain mempunyai nilai-nilai, norma-norma. Sikap serta bahasa tersendiri yang berbeda dari orang dewasa. Dengan demikian remaja pada umumnya mempunyai persamaan dalam pola tingkah laku, sikap dan nilai, dimana pola tingkah laku kolektif ini dapat berbeda dalam beberapa hal dengan orang dewasa (Priyono, 1987).

Nilai kebudayaan remaja antara lain adalah santai, bebas dan cenderung pada hal-hal yang informal dan mencari kesenangan, oleh karena itu semua hal yang kurang menyenangkan dihindari. Disamping mencari kesenangan, kelompok sebaya atau “peer group” adalah penting dalam kehidupan seorang remaja, sehingga bagi seorang remaja perlu mempunyai kelompok teman sendiri dalam pergaulan. Seorang remaja membutuhkan dukungan dan konsensus dari kelompok sebayanya. Dalam hal ini setiap penyimpangan nilai dan norma kelompok akan mendapat celaan dari kelompoknya, karena hubungan antara remaja dan kelompoknya bersifat solider dan setia kawan. Pada umumnya para remaja atas kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan persamaan dalam minat, kesenangan atau faktor lain.

Berkenaan dengan kapasitas kebudayaan remaja/Mahasiswa tersebut, setidaknya dapat dijadikan gambaran penting upaya melihat peta demokrasi dan kesadaran politik kalangan remaja di lingkungan kampus sebagai bagian pemilih pemula dalam Pemilu. Menurut Bambang, ada tiga tingkat materi yang

perlu ditanamkan dalam pemahaman atau pendidikan politik. Ketiga materi tersebut adalah penanaman hakikat pemilu yang benar sehingga memunculkan motif yang kuat bagi pemilih pemula untuk mengikuti pemilu, pemahaman mengenai sistem pemilu, dan pemahaman tentang posisi tawar politik. Pemahaman perilaku politik (Political Behavior) yaitu perilaku politik dapat dinyatakan sebagai keseluruhan tingkah laku aktor politik dan warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga-lembaga pemerintah, dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik.

Sedangkan menurut Almond dan Verba yang dimaksud budaya politik (Political Culture) merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki.

Perilaku Politik

Menurut Jack C. Plano dkk dalam Moh. Ridwan (1997) perilaku politik adalah: "Pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (pikiran, persepsi, sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang nampak (pemungutan suara,

gerak protes, lobbying, kaukus, kampanye dan demonstrasi)".

Menurut Gabriel A. Almond, proses politik akan melahirkan bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang kemudian akan disosialisasikan melalui transmisi kebudayaan, baik melalui pendidikan keluarga, kelompok-kelompok pergaulan, di lingkungan pekerjaan, interaksi melalui model media komunikasi massa, maupun interaksi politik secara langsung.

Dalam pendekatan perilaku, terdapat interaksi antara manusia satu dengan lainnya dan akan selalu terkait dengan pengetahuan, sikap dan nilai seseorang yang kemudian memunculkan orientasi sehingga timbul perilaku itu. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Orientasi politik tersebut dapat dipengaruhi oleh orientasi individu dalam memandang obyek-obyek politik. Almond dan Verba mengajukan klasifikasi tipe-tipe orientasi politik, yaitu:

1. Orientasi Kognitif, yakni pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya serta input dan outputnya.
2. Orientasi Afektif, yakni perasaan terhadap sistem politik, peranan, keberadaan aktor dan penampilannya.
3. Orientasi Evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang obyek-obyek politik yang secara tipikal

melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Sementara dalam menjelaskan orientasi seseorang terhadap obyek-obyek politik, pada bagian lain Almond mengklasifikasikan sebagai berikut:

1. Orientasi Positif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.
2. Orientasi Negatif, yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang rendah, evaluasi dan perasaan negatif yang tinggi terhadap obyek politik.
3. Orientasi Netral, yaitu orientasi yang ditunjukkan oleh frekuensi ketidakpedulian yang tinggi atau memiliki tingkat orientasi yang sangat terbatas bahkan tidak memiliki orientasi sama sekali terhadap obyek-obyek politik.

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Secara detail, V.O Key dalam Apter (1985) menggambarkan pola munculnya orientasi politik dalam mempengaruhi perilaku politik. Dijelaskan bahwa awal munculnya orientasi politik kemudian perilaku

politik adalah keinginan masyarakat untuk mewujudkan kepentingannya. Dalam mewujudkan kepentingan itu, sarana yang digunakannya adalah organisasi-organisasi politik yang oleh penguasa dijadikan sarana untuk memenangkan dukungan sehingga kemudian penguasa dapat mewujudkan tujuan untuk memberikan kemanfaatan bagi kelompok pemilihnya. Kembali awal, tujuan kemanfaatan bagi kelompok inilah yang menjadi keinginan dan kepentingan rakyat ketika ia mengharapkan organisasi politik yang dipilih mampu mewujudkannya.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Orientasi Politik

Menurut Mulyasa (2007:255) faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik Mahasiswa sebagai pemilih pemula adalah sebagai berikut :

1. Faktor Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan jumlah mahasiswa, hal ini menjadi salah satu faktor dalam mempengaruhi mahasiswa sebagai pemilih pemula untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

2. Faktor Politik

Arnstein S.R (1969) peran serta politik masyarakat didasarkan kepada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi :

a. Komunikasi Politik.

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun

potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

b. Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan (Budiarjo, 2007:22).

3. Faktor Fisik Individu dan Lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya (K. Manullang dan Gitting, 1993:13).

4. Faktor Nilai Budaya

Gabriel Almond dan Sidney Verba (1999:25), Nilai budaya politik atau *civic culture* merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik (Soemitro 1999:27) atau peradapan masyarakat (Verba, Sholozman, Bradi, 1995). Faktor

nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

Manifestasi dari apa yang dipikirkan dan diinginkan oleh manusia biasanya akan diwujudkan dalam bentuk perilaku. Dalam konteks perilaku politik, hal yang dipikirkan dan diinginkan tersebut berkaitan erat dengan orientasi politik yakni kekuasaan dimana kekuasaan itu diperolehnya dengan suatu proses pemilihan. Walaupun secara teoritis, penjelasan tentang perilaku yang muncul dari perbedaan sikap sudah terlihat jelas, namun sikap bukan sesuatu yang bisa begitu saja terjadi. Sikap terbentuk dari proses sosialisasi yang panjang, mulai manusia baru lahir sampai dewasa. Melalui proses sosialisasi inilah kemudian berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik yang berupa simpati.

Sementara menurut V.O Key, pendekatan perilaku sangat memperhitungkan faktor sosialisasi politik, yaitu cara mendalami nilai-nilai dan kepercayaan yang berlaku dan cara memperhitungkan perubahan yang terjadi. Dalam menjelaskan pola sosialisasi ini, paham perilaku beranggapan bahwa interaksi manusia antara satu dengan yang lainnya adalah sebagai pelaku (subyek) dan membentuk adanya suatu proses politik.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena

peneliti berencana melakukan pengamatan terhadap orientasi dan perilaku politik pemilih pemula dalam Pemilukada 2018. Dalam penelitian ini, difokuskan pada persoalan-persoalan sebagai berikut: 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi orientasi politik pemilih pemula berpartisipasi dalam Pemilukada 2018. 2. Untuk melihat tujuan dan orientasi politik apa yang diharapkan oleh pemilih pemula dengan memutuskan diri untuk secara aktif terlibat dalam Pemilukada 2018. Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Unisri Surakarta dari 6 (enam) Fakultas. Pengambilan informan dilakukan melalui rancangan *simple random sampling* yaitu sampel acak sederhana.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara *Field Work Research*, yaitu mengumpulkan data penelitian secara langsung di lapangan melalui wawancara secara dengan mahasiswa. Pengumpulan data dengan cara tanya-jawab secara sepihak, yang dikerjakan dengan sistematis, logis, metodologis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Metode analisis data menggunakan beberapa tahap : reduksi data, data dikelompokkan, pengambilan kesimpulan, verifikasi hasil analisis data dengan informan.

HASIL PENELITIAN

Pengertian pemilihan umum (Pemilu) secara sederhana adalah cara individu warga negara melakukan aktivitas politik ataupun kontrak politik dengan orang lain atau partai politik yang diberikan mandat atau wewenang untuk melaksanakan sebagian kekuasaan rakyat/pemilih. Pemilihan umum bukanlah pemberian

mandat kekuasaan secara total. Pengakuan partai politik yang menyatakan bahwa partainya telah memiliki pemilih dengan jumlah total tertentu dalam pemilu adalah tidak tepat. Dalam menjalankan mandatnya tersebut partai politik atau eksekutif partai politik harus melakukan komunikasi politik dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan rakyat dengan persetujuan warga.

Menurut data komisi Pemilihan Umum (KPU) propinsi Jawa Tengah 2018 terdapat 35 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pemilukada serentak dengan jumlah TPS 55.963 TPS dan jumlah pemilih tetap sebanyak 26.279.357 orang. Dari jumlah pemilih tersebut ada sekitar 60-70 persen adalah pemilih pemula (kompas.com, 26/1/2018).

Mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Dalam menggunakan hak pilih politiknya itu, mengikuti tipologi model Almond dan Verba (1990: 16) maka orientasi politik pemula ini dikategorikan menjadi, (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada kandidat, (2) orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan (3) orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah

mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Komunikasi politik dapat berarti sebagai penyebaran arti, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik. Komunikasi politik, seperti komunikasi lainnya, membutuhkan seorang pengirim, pesan-pesan, beberapa saluran atau seorang pengirim, dan seorang penerima. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga yang terspesialisasi, seperti media massa, badan-badan informasi pemerintah, atau partai politik.

Menurut pandangan mahasiswa lembaga-lembaga yang terspesialisasi, seperti media massa, badan-badan informasi pemerintah, atau partai politik sebagai komunikator politik sangat kurang dan bahkan hampir tidak pernah melakukan fungsi tersebut, dan jikalau ada biasanya mereka lakukan peran itu pada saat menjelang pemilu saja. Media massa misalnya, biasanya melakukan komunikasi politik terutama bagaimana memperkenalkan dan bahkan mempopulerkan calon, banyak calon yang berhasil terpilih berkat jasa pencitraan yang dilakukan media massa seperti Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) dan masih banyak kepala daerah yang lain berhasil terpilih juga berkat pencitraan oleh media massa. Kemudian Pemerintah (departemen dalam negeri) melalui KPU mensosialisasikan tentang pentahapan Pemilu dan

mengumumkan nama-nama calon. Sedangkan Partai Politik biasanya melakukan komunikasi politik untuk menyampaikan visi dan misi partai disamping itu juga memperkenalkan para calon yang diusung partai melalui pertemuan-pertemuan dilingkungan tempat tinggal dengan mendompleng pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh warga.

Pemilih Pemula

Empat alasan mendasar yang menyebabkan pemilih pemula mempunyai kedudukan dan makna strategis dalam Pemilu adalah, (1) alasan kuantitatif yaitu bahwa pemilih pemula ini merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum, dalam Pemilu tahun 2018 ini ada sekitar 60-70% dari \pm 28 juta pemilih adalah pemilih pemula, (2) pemilih pemula adalah merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi, (3) kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan lebih condong menjadi golput dikarenakan kebingungan karena banyaknya pilihan partai politik yang muncul yang akhirnya menjadikan mereka tidak memilih sama sekali, dalam Pemilu Jawa Tengah tahun 2018 kali ini hanya 64,6% dari warga yang menggunakan hak pilihnya, dengan demikian ada \pm 35,4% warga negara yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) (regional.kompas.com). Masih begitu besarnya golput ini bisa disebabkan karena kejenuhan proses pemilu yang berkali-kali dari Pilpres,

Pileg, Pilkada atau karenan sebab lain yaitu ketidak pedulian akan jalanya proses demokrasi karenan tidak adanya perbaikan yang signifikan dalam kehidupan mereka (para pemilih). dan (4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang sangat cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai politik untuk mempengaruhi pemilih pemula.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang pemilih adalah sebagai berikut:

- a. Faktor lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan sistem media masa. Dengan kebebasan demokrasi yang dibuka lebar sejak masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dari tahun 1999 hingga 2001 baik itu kebebasan politik terutama kebebasan media massa, sehingga masyarakat dalam hal ini mahasiswa bisa mendapatkan berbagai informasi dari berbagai sumber media (televisi, radio, Koran), inilah yang kemudian banyak dari mahasiswa lebih mengandalkan sumber informasi dari media massa ini dibandingkan dengan media komunikasi lainnya terutama dalam hal masalah politik.
- b. Faktor lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama,

sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung ini memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik serta pengalaman-pengalaman hidup. Hasil wawancara dengan mahasiswa bahwa mereka jarang sekali mendiskusikan dengan teman maupun keluarga tentang kandidat/calon kepada daerah. Jadi faktor lingkungan sosial tidak begitu berpengaruh dalam pengambilan keputusan mahasiswa dalam Pemilu tahun 2018 walaupun pernah membicarakan tentang hal tersebut dengan teman sekampus, karena mereka memiliki sumber referensi sendiri yang diperoleh dari media massa.

- c. Faktor struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Pada faktor ini ada tiga basis fungsional sikap untuk memahaminya. Basis pertama adalah yang didasarkan pada kepentingan yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek tersebut. Basis yang kedua atas dasar penyesuaian diri yaitu penilaian yang dipengaruhi oleh keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan subyek itu. Basis yang ketiga adalah sikap didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan.

Dari hasil wawancara dengan mahasiswa bahwa pilihan mereka terhadap calon kepala

daerah kebanyakan tidak ada hubungan kekerabatan dengan calon dan juga bukan berasal dari daerah yang sama dengan calon, ini menandakan bahwa pemilih lebih rasional dalam menentukan pilihannya karena dilandasi dari sumber-sumber informasi yang diperoleh dari media massa.

- d. Faktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu, keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan sesuatu kegiatan. Keterlibatan mahasiswa dalam pesta demokrasi saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya kebebasan memilih yang dijamin oleh Negara, sehingga tidak ada tekanan-tekanan yang dirasakan oleh pemilih dalam menggunakan hak pilihnya, ini dibuktikan dari semua informan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu pada tahun 2018.

Sedangkan Menurut Alfian (1990:285) faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seseorang adalah, (1) latar belakang historis, (2) kondisi geografis (geopolitik), (3) budaya politik, (4) agama dan keyakinan, dan (5) sistem kultural yang melekat dan berlaku dalam masyarakat. Selain lingkungan sosial politik tersebut, beberapa lingkungan sosial politik yang mempengaruhi perilaku politik adalah keluarga, lingkungan kampus, agama dan kelompok permainan.

Berdasarkan Kondisi mahasiswa dengan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik sebagaimana yang disampaikan Alfian, faktor latar belakang historis,

dari semua mahasiswa ternyata tidak ada yang berasal dari keluarga politisi ataupun simpatisan parpol, sehingga dalam memilih dalam Pemilu pada 2018 mereka bebas memilih calon berdasarkan pilihan yang rasional. Ini terbukti dari hasil wawancara juga mengatakan bahwa mereka pada umumnya tidak mengenal secara personal dari calon gubernur tersebut, dan bahkan calon gubernur/bupati yang mereka pilih bukan dari partai politik yang sama dengan pemilih.

Faktor kondisi geopolitik, walaupun mahasiswa banyak berasal dari soloraya dan salah satu calon gubernur berasal dari Tawangmangu (Ganjar Pranowo), namun dalam menentukan calon mana yang dipilih lebih banyak didasarkan faktor lain misalnya kepopuleran ataupun prestasi calon gubernur itu sendiri. Faktor keempat pada sebagian informan begitu sangat berpengaruh dalam menentukan pilihan mereka, mereka yang menganut agama dengan aliran tertentu dalam menentukan pilihannya sangat dipengaruhi oleh pilihan tokoh agamanya, karena bagi mereka apa yang menjadi pilihan tokoh agama tersebut wajib ditaati/diikuti karena siapa yang dipilih oleh tokoh agama tersebut adalah orang yang dipandang paling baik bagi umatnya.

Faktor sistem kultural yang melekat dan berlaku dalam masyarakat sangat mempengaruhi para mahasiswa dalam keikutsertanya dalam pesta demokrasi, dimana mereka (mahasiswa) merasa tidak nyaman kalau tidak datang ke TPS karena biasanya setelah melakukan pencoblosan pada umumnya mereka

akan menunjukkan pada yang lain bahwa mereka telah melakukan pencoblosan. Mereka akan malu kalau ternyata ketahuan tidak ikut serta melakukan pencoblosan.

Orientasi Politik Pemilih Pemula

Orientasi politik sebenarnya merupakan suatu cara pandang dari suatu golongan masyarakat dalam suatu struktur masyarakat. Timbulnya orientasi itu dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat yang kemudian membentuk sikap dan menjadi pola mereka untuk memandang suatu obyek politik. Orientasi politik itulah yang kemudian membentuk tatanan dimana interaksi-interaksi yang muncul tersebut akhirnya mempengaruhi perilaku politik yang dilakukan seseorang. Hal ini tercermin dari sikap dari mahasiswa dimana terdapat berbagai pandangan tentang Pemilu tahun 2018 ini, ada yang sangat antusias mengikuti Pemilu dengan datang ke TPS-TPS, hal ini dikarenakan mereka meyakini dengan calon-calon gubernur/bupati yang dipandang cukup baik, yang diyakini akan membawa perubahan/perbaikan dan kemajuan dimasyarakat. Namun sebaliknya ada pula yang bersikap apatis terhadap Pemilu tahun 2018 dengan tidak ikut memilih. Mereka beralasan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan/berarti terhadap kehidupan masyarakat selama ini. Meskipun silih berganti pejabat gubernur/bupati dari hasil Pemilu namun keadaan masyarakat tetap sama saja.

Sedangkan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut. (1) menduduki jabatan politik atau administratif, (2) mencari jabatan politik atau administratif, (3) keanggotaan aktif dalam suatu organisasi politik, (4) keanggotaan pasif dalam suatu organisasi politik, (5) keanggotaan aktif dalam suatu organisasi semu politik, (6) keanggotaan pasif dalam suatu organisasi semu politik, (7) partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya, (8) partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik, dan (9) pemberian suara (Rush dan Althoff 2000: 124). Dari hasil wawancara dengan mahasiswa unisri partisipasi politiknya masih sebatas pada keterlibatan pada pemberian suara, hampir tidak ada yang tertarik pada kehidupan politik seperti masuk dalam keanggotaan partai politik, berpartisipasi dalam diskusi politik dll, sebagaimana yang diungkapkan Rush dan Althoff di atas.

Simpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku mahasiswa dalam Pemilu tahun 2018

adalah faktor pengaruh media massa, faktor sosial politik, faktor citra kandidat, faktor *Current events* atau reponsibilitas calon terhadap persoalan yang ada.

Orientasi politik pemilih pemula mahasiswa Unisri adalah orientasi positif. Hal tersebut terbukti dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada pemilih pemula yang mengatakan bahwa mereka lebih sering mengikuti perkembangan informasi mengenai Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2018 dari berbagai media massa seperti internet, televisi dan Koran.

Orientasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Jawa Tengah 2018 baik itu meliputi orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1990. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Apter, David E. 1985. *Pengantar Analisa Politik*. LP3ES. Jakarta.
- Arfani, Riza Noer. 2010. *Demokrasi Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arnstein, S. 1969. *A Ladder of Citizen Participation*, vol. 35, NO. 4. Buana Karya.
- Budiardjo Miriam. 2007. *Masalah Kenegaraan*, Jakarta: PT Gramedia.
- Duverger, Maurice. 1988. *Parpol dan Kelompok Kepentingan*. Rajawali Press. Jakarta.
- Panggabean 1994. *Pendidikan Politik dan Kaderisasi Bangsa*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Piliang, Indra J. 2008. *Kaum Remaja dan Demokrasi*. Jakarta; Kibar Priyono, Onny. 1987.
- Kebudayaan Remaja dan Sub-Kebudayaan Delinkuen. CSIS, Jakarta.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik komunikator Pesan Media*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ridwan, Moh. 1997, *Perilaku Politik NU Pasca Pernyataan Kembali ke Khittah 1926*. Skripsi.
- Subekti, Ramlan, 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: P.T. Grasindo.
- Suharsimi A. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhartono, dkk. 2006. *Tingkat Kesadaran Politik Pemilih pemula dalam Pemilihan*. Jakarta; Universitas Pendidikan Indonesia.
- Undang-Undang. (2005). *Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun*

2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan PERPU Nomor 3 Tahun 2005 Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta : Penerbit Forum Indonesia Maju (Himpunan Anggota DPR-RI 1999-2004).

<http://jateng.tribunnews.com/2017/04/04/dpt-pilgub-jateng-mengacu-data-e-ktp>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/04/21000011/jumlah-pemilih-potensial-Pemilukada-serentak-2018-capai-160-juta-jiwa>

<https://www.jawapos.com/read/2017/12/19/175914/pilgub-2018-kpu-solo-targetkan-golput-di-bawah-23-persen>

<http://nasional.kompas.com/read/2017/12/04/21000011/jumlah-pemilih-potensial-Pemilukada-serentak-2018-capai-160-juta-jiwa>

<http://regional.kompas.com> (27 Juni 2018).

<http://kompas.com>, 26/1/2018).